

BAB III

POLITIK LUAR NEGERI FEMINIS SWEDIA

Swedia terletak di Utara Eropa antara Finlandia dan Norwegia. Ibu kotanya berada di Stockholm. Penduduk Swedia ada sekitar 9,5 juta jiwa dengan mayoritas beragama Kristen. Bahasa mayoritas di Swedia adalah bahasa Swedia. Swedia adalah salah satu negara yang memiliki angka harapan hidup yang cukup tinggi, yaitu 80 tahun untuk laki-laki dan 84 tahun untuk perempuan.

Kepala negara Swedia adalah seorang raja, yaitu Raja Carl XVI Gustaf yang naik tahta pada sejak tahun 1973 setelah wafat kakeknya. Ayah Raja Carl XVI Gustaf telah lama wafat yaitu pada tahun 1947 dalam kecelakaan pesawat. Pada saat itu, Raja Carl XVI Gustaf baru berusia 9 bulan⁵⁰. Selama menduduki tahta, Raja Carl XVI Gustaf tidak luput dari menjalani pelatihan militer. Ia juga belajar mengenai sejarah, politik dan ekonomi di beberapa universitas di Swedia.

Selain memiliki kepala negara, Swedia juga memiliki perdana menteri yang bernama Stefa Lofven. Ia terpilih menjadi perdana menteri pada pemilihan tahun 2014 lalu. Lofven berjanji untuk terus mencari dukungan sebesar-besarnya demi mendukung rencananya untuk mendorong kesejahteraan, peningkatan pendidikan dan pekerjaan.

Posisi Swedia yaitu sebagai salah satu negara industri termaju di dunia. Angka pengangguran di negara ini terbilang sangat rendah dan perekonomiannya sangat kuat. Kemitraan antara sektor publik dan swasta menjadi model andalan kemitraan Swedia yang dikembangkan oleh partai sosial

⁵⁰BBC, “*Sweden Country Profile*”, diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-europe-17955808> pada 4 April 2018 pukul 10.32

demokrat yang memimpin negara tersebut selama kurang lebih 70 tahun sampai 2006 lalu.

Ekonomi Swedia terbuka dan kompetitif telah sangat berkembang dan Swedia telah mencapai standar hidup yang patut ditiru dengan kombinasi konsep pasar kapitalisme bebas dan manfaat kesejahteraan yang luas. Swedia tetap berada di luar zona euro karena kekhawatiran jika bergabung dengan *Economics and Monetary of European Unioin* akan mengurangi kedaulatan negara atas sistem kesejahteraannya. Kayu, tenaga air, dan bijih besi merupakan basis sumber daya dari ekonomi manufaktur yang sangat bergantung pada perdagangan luar negeri. termasuk mesin kendaraan bermotor, dan peralatan telekomunikasi yang mencakup lebih dari 44% PDB. PDB negara ini tumbuh sekitar 3,3% pada tahun 2016 dan 2017 yang sebagian besar didorong oleh investasi di sektor konstruksi. Ekonomi global mendorong ekspor manufaktur Swedia lebih lanjut, membantu mendorong pertumbuhan ekonomi domestik pada 2017⁵¹.

Selain perekonomian yang sangat maju yang menonjol dari Swedia, isu mengenai militer pun sangat disorot di negara ini, karena Swedia terkenal sebagai negara yang cukup netral dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Kekuatan militer selama abad ke-17, Swedia tidak berpartisipasi dalam perang apa pun selama dua abad. Suatu netralitas bersenjata dilestarikan di kedua perang dunia. Formula ekonomi Swedia yang sukses lama dari sistem kapitalis bercampur dengan unsur-unsur kesejahteraan substansial ditantang pada 1990-an oleh tingginya pengangguran dan pada tahun 2000 dan 2009 akibat kemerosotan ekonomi global. Swedia bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1995, tetapi publik menolak pengenalan euro dalam referendum 2003⁵².

⁵¹ Central Intelligence Agency, “*The World Factbook*”, diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sw.html> pada 4 April 2018 pukul 11.03

⁵² Ibid

A. Sejarah Feminisme di Swedia

Feminisme berkembang di Swedia sudah sejak sangat lama, bahkan sejak munculnya gelombang feminisme pertama di dunia. Meskipun pada saat itu, gerakan-gerakan feminisme di Swedia masih belum terlalu masif, hanya beberapa kelompok saja yang mulai menyuarakan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki, khususnya dalam bidang menuntut ilmu disekolah dan hak waris bagi perempuan. Namun menjelang masuknya gelombang feminisme kedua, mulai muncul berbagai gerakan perempuan, khususnya salah satu gerakan perempuan terbesar di Swedia, yaitu *The Women's Shelter Movement* yang mulai berdiri sejak 1975 dan masih berkembang pesat bahkan sampai saat ini.

Gelombang kedua feminisme di Swedia ini menuntut akan banyaknya terjadi pernikahan yang tidak bahagia. Selain itu juga menuntut tempat penitipan anak yang layak bagi semua perempuan yang bekerja diluar rumah dan tidak sempat menjaga anaknya selama mereka bekerja, hak aborsi dan mengenai kontrasepsi serta menuntut diakuiinya keberadaan *women's liberation* untuk menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan pengapusan klaster kelas dalam masyarakat. Berbagai tindakan dilakukan oleh gerakan perempuan pada saat itu untuk menyuarakan tuntutanannya, seperti melalui perwakilan perempuan yang ada di pemerintahan dan melalui demo di jalan-jalan.

Gelombang feminisme ketiga muncul sekitar tahun 1990-2000-an. Gerakan perempuan di Swedia berkembang semakin masif. Tahun-tahun sebelumnya, angka presentase perwakilan perempuan di parlemen Swedia semakin menurun, sehingga pada gelombang feminisme ke tiga ini, gerakan perempuan mengkritik pemerintah mengenai penurunan presentase perwakilan perempuan di parlemen dan menuntut untuk ditingkatkannya kembali presentase tersebut. Berbagai perdebatan mengenai perbedaanpun mulai muncul diranah publik. Pada saat ini, feminisme menjadi identitas yang sangat diidam-idamkan, khususnya oleh kaum perempuan. Selain itu,

identitas feminisme ini juga mengintegrasikan berbagai perempuan di Swedia dalam satu suara menyuarakan kesetaraan hak bagi perempuan maupu laki-laki dan memberdayakan perempuan. Pada tahun-tahun ini pula, mulai munculnya benih-benih pemerintahan yang feminis di Swedia dengan besarnya desakan pemerintah akan hasil penelitian mengenai feminisme.

Pada gelombang feminisme ketiga ini, terjadi beberapa reformasi penting di Swedia seperti “Daddy’s months”. Yang dimaksud disini adalah bahwa suami atau seseorang yang baru memiliki anak juga mendapatkan beberapa bulan cuti kerja. Sehingga, tidak hanya perempuan saja yang mendapatkan cuti. Hal ini dimaksudkan bahwa laki-laki juga memiliki kewajiban yang sama seperti perempuan dalam mengurus anak dan sebagai orang tua, sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki cuti beberapa bulan bekerja untuk mengurus anaknya yang baru lahir. Reformasi lainnya yaitu munculnya konsensus mengenai kesetaraan gender sebagai tujuan politik di Parlemen. Maksudnya disini adalah bahwa kesetaraan gender itu tidak hanya sebagai isu sosial biasa, melainkan sebagai tujuan politik, dimana bahwa kepentingan politik tidak boleh lepas dari nilai-nilai kesetaraan gender.

Swedia menggunakan kesetaraan gender sebagai tujuan eksplisit politiknya. Dimana pemerintah Swedia percaya bahwa laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak yang sama dalam membentuk masyarakat dan membentuk kehidupan yang mereka inginkan. Jika laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama khususnya di bidang politik, maka tidak akan terjadi ketimpangan kepentingan antara laki-laki dan perempuan dalam hasil kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, apalagi yang memiliki dampak luas bagi masyarakat secara luas. Kesetaraan gender yang diharapkan oleh pemerintah Swedia disini tidak hanyak kesetaraan perwakilan dalam sektor swasta, sektor publik tetapi juga sektor sipil. Selain itu, kesetaraan ekonomi juga merupakan poin penting yang tidak lepas dari kepentingan

politik. Tujuan eksplisit lainnya yaitu untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki.

Saat ini di Swedia, gerakan-gerakan perempuan tidak hanya berjalan dalam bentuk demo melainkan juga seperti yang berkembang di Swedia saat ini yaitu *cyber feminism*, dimana aktivis-aktivis muda melakukan berbagai diskusi secara *online*, berbagi berbagai artikel, film dan foto-foto yang tentunya mengenai isu kesetaraan gender atau feminisme. Tidak hanya itu, gerakan perempuan juga mulai meningkatkan isu-isu akan kesadaran mengenai interseksi antara seksis-rasis-penindasan (*intersection sexism-racism-class oppression*).

Swedia adalah negara pertama yang memiliki pemerintahan feminis di dunia, yang artinya bahwa kesetaraan gender menjadi pusat prioritas kepentingan pemerintah, baik dalam pembuatan keputusan maupun alokasi sumber daya alam. Pemerintah feminis meyakinkan bahwa perspektif kesetaraan gender akan selalu dibawa dalam pembentukan keputusan atau kebijakan baik nasional maupun internasional. Pemerintah Swedia meyakini bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki kekuasaan yang sama dalam membentuk masyarakat dan hidupnya masing-masing tanpa intervensi salah satu pihak. Kesetaraan gender ini diyakini pemerintah Swedia sebagai hak asasi manusia (HAM) yang sangat penting dalam mencapai demokrasi dan keadilan. Kesetaraan gender juga menjadi salah satu solusi dalam memecahkan tantangan masalah dalam masyarakat modern saat ini, khususnya di *welfare state*⁵³.

Alat utama dan terpenting dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan feminis yaitu melalui *gender mainstreaming*. *Gender mainstreaming* atau pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi yang

⁵³Welfare state atau negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (Democracy). Penegakan Hukum (Rule of Law), perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (Social Justice) dan anti diskriminasi

diterima secara global untuk mempromosikan kesetaraan gender. *Gender mainstreaming* bukanlah tujuan melainkan suatu strategi, pendekatan, sarana untuk mencapai tujuan dari kesetaraan gender. *Gender mainstreaming* ini memastikan bahwa perspektif gender adalah pusat dari semua kegiatan seperti pembangunan, kebijakan, penelitian, advokasi atau dialog, legislasi, alokasi sumber daya, perencanaan, implementasi dan pemantauan dalam program dan proyek⁵⁴.

Sementara itu, Swedia berada di peringkat no. 4 dalam Indeks Kesenjangan Gender Global pada tahun 2013, yang mengukur kesetaraan di bidang ekonomi, politik, pendidikan dan kesehatan. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa perempuan Swedia memiliki 85% dari total upah laki-laki dan 66% dari total pensiun mereka⁵⁵. Swedia juga dikenal dengan undang-undangnya yang inovatif tentang cuti melahirkan dan paternitas.

Swedia yang sudah dikenal dengan kebijakan progresifnya dalam menjunjung tinggi perspektif feminisme, namun baru pada tanggal 14 September 2014, salah satu negara Skandinavia ini menjadi yang pertama di dunia yang memilih partai feminis masuk ke dalam parlemennya. *Feministiskt Initiativ* adalah partai politik yang berhaluan kiri dan antirasial yang didirikan pada tahun 2005 lalu telah mendapatkan popularitasnya dalam beberapa bulan terakhir pada tahun 2014. Jajak pendapat menunjukkan bahwa partai *Feministiskt Initiativ* mendekati atau melewati 4% yang dibutuhkan untuk mendapatkan kursi di Parlemen Stockholm⁵⁶. Dengan slogannya "Out with the racists, in with

⁵⁴UN Women, "*Gender Mainstreaming*", diakses dari www.un.org/womenwatch/osagi/gendermainstreaming.htm pada 4 April 2018 pukul 12.29

⁵⁵Viola Gad, "Feminism Comes to The Forefront of Swedish Politics", diakses dari <http://time.com/3319652/feminism-comes-to-the-forefront-of-swedish-politics/> pada 4 April 2018 pukul 13.01

⁵⁶Ibid

the feminists" partai itu telah memperluas nilai-nilai feminis tradisional untuk memerangi diskriminasi atas dasar ras, identitas seksual dan cacat fisik. Ketua dan salah satu pendiri partai, Gudrun Schyman mengatakan bahwa partai ini telah berkembang dari sekitar 1.500 anggota pada bulan Januari 2014 menjadi lebih dari 17.000 anggota pada bulan Juli 2014. Schyman pernah mengatakan bahwa keberhasilan partai feminis adalah karena kampanye *door-to-door* yang dilakukan dengan hati-hati selama 12 bula. Schyman mengunjungi setiap rumah Swedia di mana tuan rumah berjanji untuk mengumpulkan kerumunan setidaknya 25 orang. Selama pertemuan dua jam dengan orang-orang tersebut, Schyman membicarakan mengenai rasisme yang berkembang di masyarakat Swedia, kebutuhan akan pensiun yang lebih baik dan upah yang setara bagi perempuan maupun laki-laki. Partai ini juga mendapatkan perhatian masyarakat dengan menanggapi isu perasaan antirasis yang muncul setelah partai-partai anti-imigrasi yang semakin meningkat. *Feministiskt Initiativ* juga berhasil dalam ranah politik Eropa dengan terlihat pada ada bulan Mei 2014 lalu, partai ini mendapatkan 5,3% suara orang Swedia dan seorang wanita Roma, Soraya Post, disambut sebagai anggota pertama partai feminis yang duduk di Parlemen Eropa.

Ketika sedang melakukan berbagai kampanye, partai feminis ini pernah merencanakan untuk mendirikan kementerian kesetaraan gender, hingga akhirnya saat ini Swedia memiliki Kementerian Kesetaraan gender. Namun kementerian ini tidak berdiri sendiri, tetapi juga berdiri untuk mengangkat isu anak dan orang tua, sehingga kementerian ini bernama *Ministry for Children, the Elderly and Gender Equality*. Menteri Kesetaraan Gender Swedia yang baru saat ini adalah Lena Hallengren. Ia terpilih menjadi menteri yang baru tepat pada Hari Perempuan Internasional sebelumnya, ia memang sudah berkecimpung dalam dunia politik, yaitu

mantan wakil menteri pendidikan yang berfokus pada bidang *preschool*, isu-isu pemuda, pada tahun 2002-2006⁵⁷.

Namun ternyata, meskipun Swedia baru secara tegas menyatakan dirinya sebagai pemerintahan yang feminis, nyatanya sejak diadopsinya resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB, pemerintah Swedia telah aktif bekerja dalam agenda untuk mengangkat isu perempuan, perdamaian dan keamanan dengan diresmikannya *Sweden's Action Plan* pada tahun 2006⁵⁸. Resolusi DK PBB 1325 itu sendiri berisi :

“reaffirms the important role of women in the prevention and resolution of conflicts, peace negotiations, peace-building, peacekeeping, humanitarian response and in post-conflict reconstruction and stresses the importance of their equal participation and full involvement in all efforts for the maintenance and promotion of peace and security.”⁵⁹

Resolusi DK PBB 1325 berisikan mengenai penegasan kembali mengenai pentingnya peran perempuan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, negosiasi perdamaian, membangun perdamaian, menjaga perdamaian, bantuan kemanusiaan. Dan juga paska terjadinya konflik, rekonstruksi dan menekankan pentingnya kesetaraan partisipasi perempuan dan keterlibatan secara penuh dan usaha-usahanya untuk menjaga dan mendukung perdamaian dan keamanan. Dengan begitu, meskipun Swedia adalah negara pertama yang menyatakan dirinya sebagai negara feminis, namun faktanya Swedia tidak berdiri sendiri dalam menjunjung tinggi dan mencapai target kesetaraan gender, karena banyak negara-

⁵⁷ Government Offices of Sweden, “*A Feminist Government*”, diakses dari <http://www.government.se/government-policy/a-feminist-government/> pada 4 April 2018 pukul 13.11

⁵⁸ Government Offices of Sweden, “*Sweden's National Action Plan for The Implementation of The UN Security Council Resolutions on Women, Peace and Security 2016-2020*”, 2015, hal. 7

⁵⁹ Karin Anggestam dan Annika Bergman-Rosamond, “*Swedish Feminist Foreign Policy in The Making: Ethics, Politics, and Gender*”, Carnegie Council for Ethics in International Affairs, 2016, hal. 323

negara yang juga ikut berdiri dalam mendukung hal tersebut, meskipun langkahnya tidak setegas dan seradikal yang dilakukan oleh Swedia.

B. Kesetaraan Gender di Swedia

Kesetaraan gender berarti tidak hanya pemerataan antara laki-laki dan perempuan di semua ranah masyarakat, namun juga tentang aspek kualitatif, memastikan bahwa pengetahuan dan pengalaman laki-laki dan perempuan digunakan untuk mendorong kemajuan di semua aspek masyarakat. Laporan *Global Gender Gap* tahunan, yang diperkenalkan oleh *World Economic Forum* pada 2006, mengukur kesetaraan di bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan. Sejak awal laporan, Swedia tidak pernah berada lebih rendah dari peringkat kelima di *Gender Gap*⁶⁰. Ini merupakan suatu pencapaian bagi negara tersebut yang membuktikan bahwa *gender gap* di Swedia sangat rendah dan kesetaraan gender di negara ini terbilang tinggi.

B.1. Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

Kesetaraan gender sangat ditekankan dalam UU pendidikan, undang-undang yang mengatur semua pendidikan di Swedia. Ini menyatakan bahwa kesetaraan gender harus mencapai dan memandu semua tingkat sistem pendidikan Swedia. Prinsip-prinsip tersebut semakin dimasukkan ke dalam pendidikan dari tingkat pra-sekolah dan seterusnya, dengan tujuan memberi anak kesempatan yang sama dalam kehidupan, tanpa memandang jenis kelamin mereka, dengan menggunakan metode pengajaran yang melawan pola-pola gender tradisional dan peran gender. Saat ini, anak perempuan umumnya memiliki nilai yang lebih baik di sekolah Swedia daripada anak laki-laki. Anak-anak perempuan juga bekerja lebih baik dalam ujian nasional, dan sebagian besar anak perempuan menyelesaikan pendidikan menengah atas. Padahal

⁶⁰ Gender gap adalah kesenjangan gender

beberapa dekade yang lalu, wilayah universitas didominasi oleh laki-laki, hari ini hampir dua pertiga dari semua gelar universitas di Swedia diberikan kepada perempuan. Jumlah perempuan dan laki-laki yang sama kini mengambil bagian dalam studi paska sarjana dan doktoral.

B.2. Kesetaraan Gender dalam Ekonomi

Pada tahun 2015, terdapat 97 perempuan dan 102 laki-laki adalah kepala badan publik di Swedia, posisi ini adalah posisi yang ditunjuk oleh pemerintah. Menurut laporan *Statistics Sweden's bi-annual report on gender equality* yang diterbitkan pada tahun 2016, hanya 6% posisi CEO di perusahaan-perusahaan yang terdaftar diduduki oleh perempuan, dan ketua dewan (chairperson) perempuan di perusahaan ada sebanyak 5% dan ada 29% anggota dewan (board member) perusahaan yang perempuan. Di sektor swasta dan publik, laporan menunjukkan bahwa 37% manajer adalah perempuan⁶¹.

Sistem kesejahteraan yang mendorong keseimbangan kehidupan dan kerja yang sehat telah menjadi faktor penting dalam menjadikan Swedia sebagai negara pemimpin kesetaraan gender. Orang tua berhak untuk berbagi 480 hari, atau sekitar 16 bulan, dari cuti orangtua yang dibayar ketika seorang anak lahir atau mengadopsi anak. Cuti ini dapat diambil per bulan, minggu, hari atau bahkan per jam. Nyatanya, yang sebagian besar menggunakan jatah cuti orang tua ini adalah perempuan. Sedangkan laki-laki hanya mengambil sekitar seperempat dari jatah cuti. Selama 390 hari, orang tua berhak mendapatkan hampir 80 persen dari gaji mereka, hingga maksimum SEK 967 per hari. Sisa 90 hari dibayar dengan tarif harian SEK 180.

⁶¹Government of Sweden, “*Gender Equality in Sweden*”, diakses dari <https://sweden.se/society/gender-equality-in-sweden/> pada 9 April 2018 pukul 20.03

Ada dua bagian dari undang-undang diskriminasi Swedia berhubungan dengan kesetaraan gender di tempat kerja. Pertama, ada persyaratan bahwa semua pengusaha harus secara aktif mengejar tujuan tertentu untuk mempromosikan kesetaraan antara pria dan wanita. Kedua, undang-undang melarang diskriminasi dan mewajibkan pengusaha untuk menyelidiki dan mengambil tindakan pencegahan terhadap pelecehan apapun. Selain itu, pengusaha tidak boleh memperlakukan karyawan atau pelamar pekerjaan secara tidak jujur yang telah atau akan mengambil cuti orang tua.

B.3. Kesetaraan Gender dalam Politik

Swedia adalah salah satu negara representasi perempuan di parlemen tertinggi di dunia. Lebih tepatnya, setelah pemilu 2014, ada 43,6% atau sebanyak 152 kursi dari 349 kursi di parlemen diduduki oleh perempuan. Meskipun demikian, angka itu mengalami penurunan dari 45 persen dalam pemilu 2010 lalu. Namun, saat ini ada 12 dari 23 menteri di Swedia adalah perempuan⁶².

Grafik 3.1 Representasi Perempuan di Swedia dalam Parlemen (%)



Sumber : The World Bank

⁶² ibid

Dari data hasil survei Bank Dunia pada tahun 2000-2017, terlihat bahwa kuota perempuan di Swedia tidak pernah dibawah 40%, bahkan pernah mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 47,3% pada tahun 2006. Hal ini menunjukkan bukti komitmen Swedia dalam menerapkan kesetaraan gender dalam bidang politik.

C. Politik Luar Negeri Feminis Swedia

Swedia sebagai negara yang berkomitmen tegas untuk menerapkan perspektif gender dalam berbagai kebijakannya telah membuktikan hasil yang cukup signifikan. Hal tersebut terbukti dengan kesetaraan gender yang ada di Swedia dalam berbagai bidang yang telah dipaparkan diatas. Dengan mencoba menghapus stereotip perihal gender di masyarakat melalui kebijakan-kebijakan kesetaraan gender dalam berbagai sektor membuktikan, hal tersebut menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya, itu mengapa Swedia disebut sebagai salah satu *welfare state* atau negara kesejahteraan. Melihat hasil dan berjalannya penerapan perspektif gender dalam berbagai sektor membuat pemerintah Swedia merasa hal ini perlu di terapkan di berbagai negara agar kesejahteraan dan perdamaian dunia dapat tercapai. Demi ambisi yang ambisius ini, Menteri Luar Negeri Swedia, Margot Wallström pada Oktober 2014 mengumumkan kepada dunia bahwa sejak saat itu Swedia mengadopsi politik luar negeri feminis⁶³. Wallström menyatakan bahwa Swedia adalah negara pertama yang menerapkan hal tersebut. Wallström juga menegaskan bahwa tindakan feminis yang dilakukan Swedia bukanlah isu tunggal dalam agenda yang lebih luas, namun merupakan pendekatan keseluruhan untuk mempraktikkan kebijakan luar

⁶³Foreign Affairs Ministry of Sweden, “*Sweden feminist foreign policy examples from three years of implementation*”, Government Offices of Sweden, diakses dari www.government.se/information-material/2017/10/swedens-feminist-foreign-policy-examples-from-three-years-of-implementation/, pada tanggal 10 April 2018 pukul 21.03

negeri⁶⁴. Ambisi ini dinyatakan sebagai bentuk tindakan yang sangat berani dan memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk mencapai kesetaraan gender dan pemenuhan hak asasi manusia secara penuh untuk semua perempuan. Mengadopsi politik luar negeri feminis ini dapat dikatakan juga sebagai suatu tindakan perubahan kebijakan yang cukup radikal. Kebijakan ini sebenarnya merupakan salah satu upaya Swedia dalam mencapai target global dengan cara yang lebih luas untuk mempromosikan kesetaraan gender di arena internasional. Pemerintah Swedia yang menginginkan terhapusnya berbagai bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan, dengan itu secara tegas mengeluarkan politik luar negeri feminis yang belum pernah dilakukan oleh negara manapun di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir ini, berbagai negara di dunia bekerja keras menjadikan isu kesetaraan gender dan pemenuhan HAM bagi perempuan secara utuh sebagai isu global yang perlu ditangani dengan efektif. Maka dari itu, politik luar negeri feminis yang dibentuk oleh Pemerintah Swedia ini menjadi suatu alat yang sangat penting dalam menangani isu global tersebut. Politik luar negeri feminis ini adalah implementasi suatu agenda yang dilakukan oleh kementerian luar negeri Swedia untuk melakukan perubahan untuk memperkuat hak asasi manusia, representasi dan pemerataan pembagian sumber daya bagi seluruh perempuan di dunia dengan cara mengintegrasikan perspektif gender kedalam seluruh kegiatannya.

Tujuan mendasar dari politik luar negeri Swedia seperti yang dijelaskan oleh kementerian luar negeri Swedia adalah sebagai berikut :

“Increased global gender equality and strengthened rights and empowerment of women and girl’s by

⁶⁴Annina Claesson, “*Hiding Behind the F-Word: the Failures of Sweden's Feminist Foreign Policy*”, diakses dari <http://centreforforeignpolicy.org/journal/2017/8/21/hiding-behind-the-f-word-the-failures-of-swedens-feminist-foreign-policy> , pada 10 April 2018 pukul 21.36

systematically working with a gender perspective within all foreign policy areas”⁶⁵

Dari pernyataan kementerian luar negeri Swedia tersebut, sudah sangat jelas bahwa Swedia akan meningkatkan kesetaraan gender secara global dan memperkuat hak serta pemberdayaan terhadap perempuan melalui kinerja yang sistematis dengan menggunakan perspektif gender dalam setiap arena politik luar negerinya. Politik luar negeri feminis Swedia juga berusaha untuk mengatasi ketidaksetaraan gender termasuk juga kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

Selain itu, tujuan dari politik luar negeri feminis Swedia tidak hanya untuk melawan ketidakadilan bagi perempuan, melainkan juga untuk mendukung terciptanya perdamaian, stabilitas dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Politik luar negeri feminis Swedia sendiri memiliki 4 pilar yang disebut “4Rs”, yaitu *Rights, Realities and Analysis, Representation, and Resources* (Hak Asasi Manusia, Realita dan Analisis, Representasi dan Sumberdaya)⁶⁶. Pilar pertama adalah *rights* atau hak asasi manusia, dimana Swedia adalah negara yang sangat tegas dalam mengadvokasikan hak perempuan sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Kedua adalah *realities and analysis* atau realita dan analisis, dimana politik luar negeri yang akan diterapkan Swedia akan berdasarkan pada realita dan hasil analisis, khususnya mengenai kesenjangan gender. Pilar ketiga adalah *representation* atau representasi atau sering pula disebut perwakilan. Swedia adalah negara yang sudah memiliki *high profile*. Politik luar negeri Swedia menempatkan penekanan yang sangat kuat dalam mendukung partisipasi dan perwakilan perempuan dalam politik baik politik secara general maupun hubungannya dengan proses

⁶⁵Ministry of Foreign Affairs (MFA) Sweden, “*Draft Action Plan for Feminist Foreign Policy 2015-2018*,” internal draft, 2015, hal. 2

⁶⁶Dyan Mazurana dan Daniel Maxwell, “*Sweden’s Feminist Foreign Policy: Implications for Humanitarian Response*”. Feinstein International Research. Januari 2016, hal. 1

dan operasi perdamaian. Dan pilar terakhir adalah *resources* atau sumber daya, yaitu dimana potilik luar negeri Swedia akan mendukung secara tegas pendistribusian sumberdaya alam yang adil dan berbasis pada *gender-sensitive*⁶⁷.

Politik luar negeri feminis Swedia ini akan membantu untuk mencapai hasil yang konkrit dalam mencapai kesetaraan gender dan kebebasan secara penuh dalam mendapatkan hak asasi manusia bagi seluruh perempuan didunia ini. Dengan ini, politik luar negeri feminis Swedia akan mengimplementasikan perspektif gender secara sistematis yang berdasarkan pada pengetahuan dan analisis di seluruh agenda politik luar negeri, paling tidak dalam upaya perdamaian dan keamanan.

Politik luar negeri feminis Swedia memiliki fokus yang sangat jelas dalam mendukung perempuan sebagai aktor dalam tercapainya perdamaian dan keamanan. Pengaruh dan partisipasi perempuan dalam hal perdamaian dan keamanan adalah sama-sama mengenai keefektivitasan dan hak asasi manusia. *Sweden's National Action Plan* (sebagai bentuk untuk pengimplementasian resolusi 1325 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa) adalah suatu misi perubahan⁶⁸. *Sweden's National Action Plan* yang pertama keluar pada tahun 2006 sejak resolusi DK PBB 1325 diluncurkan. Swedia akan memiliki kepemimpinan politik yang lebih jelas untuk memajukan agenda perihal perempuan, perdamaian dan keamanan. Fokusnya adalah pada implementasi dan mencapai perubahan nyata dalam bentuk kerja sama dengan berbagai kalangan baik itu secara nasional maupun global. Swedia akan memastikan bahwa agenda mengenai perempuan, perdamaian dan keamanan akan terintegrasi kedalam seluruh kinerja untuk mencapai perdamaian dan keamanan. Selain itu, laporan

⁶⁷Jenny K. Lorentzen & Julie Marie Hansen, "Integrating Gender into Foreign Policy", PRIO Gender, Peace, and Security, Vol.3, 2016, hal. 3

⁶⁸Government Offices of Sweden, "Sweden's National Action Plan for The Implementation of The UN Security Council Resolutions on Women, Peace and Security 2016-2020", 2015, hal. 3

tahunan mengenai kinerja Swedia dalam isu perempuan, perdamaian dan keamanan akan dibuat.

Untuk mendukung secara penuh keberadaan perempuan dalam mencapai perdamaian dan keamanan, Swedia akan mendukung dengan cara :

1. Membuat perempuan terlihat dan memperkuat pengaruh dan partisipasinya dalam proses membangun perdamaian.
2. Mengatasi akar penyebab terjadinya konflik dan kekerasan dengan membiarkan perempuan dan laki-laki terjun dalam mengatasi konflik.
3. Memperkuat proteksi terhadap perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dalam hubungannya dengan dan setelah konflik bersenjata.
4. Memperkuat perspektif gender dalam kinerja untuk mencapai perdamaian dan keamanan⁶⁹.

Politik luar negeri feminis Swedia menggunakan perspektif feminis dalam penerapan politik luar negerinya dengan tujuan untuk menegosiasi kembali dan menantang kekuasaan hierarki yang selama ini membentuk sistem politik luar negeri. Menteri luar negeri Swedia, Margot Wallström yang mempelopori munculnya Politik Luar Negeri Feminis mengklaim bahwa feminisme ini adalah suatu istilah yang sangat bagus untuk digunakan karena feminisme itu berdiri untuk mengsubordinasi perempuan secara sistematis dan global⁷⁰. Selain itu, dengan menerapkan perspektif feminisme, politik luar negeri Swedia merefleksikan suatu komitmen yang tegas untuk menerapkan prinsip feminisme.

Keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian menjadi area yang diprioritaskan oleh pemerintah Swedia dalam politik luar negerinya. Meskipun dalam beberapa dekade terakhir ini ada terobosan yang cukup signifikan oleh perempuan yang terjun ke ranah politik dan publik, akan tetapi data statistik menunjukkan bahwa masih

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Lorentzen & Hansen, *op.cit.*, hal. 2

rendahnya angka kesetaraan gender dan keterlibatan perempuan jika dibandingkan dengan keterlibatan laki-laki di ranah politik dan publik. Faktanya, 78% kursi di parlemen didunia ini masih diduduki oleh laki-laki. Sekitar 90% pemimpin negara didunia ini juga masih diduduki laki-laki, yang artinya hanya ada 10% pemimpin negara perempuan di dunia ini. Serta ada sekitar 83% menteri didunia ini adalah laki-laki. Angka partisipasi perempuan sebagai duta besar hanya ada sekitar 15%⁷¹.

Angka yang cukup mencengangkan lainnya yaitu peran dan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian, sesuai dengan tujuand ari resolusi DK PBB 1325, dimana angka ketua mediator perempuan dalam proses perdamaian masih sangat rendah sekali, yaitu hanya 2,5%. Sedangkan angka keterliabtan perempuan sebagai negosiator perdamaian masih dibawah 10%, lebih tepatnya hanya mencapai angka 9%. Dan partisipasi perempuan sebagai penandatanganan (signatories) dalam perjanjian perdamaian hanya 4%. Namun meskipun pemerintah Swedia berusaha dengan sangat tegas untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah politik dan publik, namun untuk mencapai hasil yang maksimal dari diterapkannya politik luar negeri feminis ini, tidak dapat dilupakan bahwa peran keterlibatan laki-laki pun sangat penting disini dalam proses pencapaian kesetaraan gender semaksimal mungkin.

⁷¹UN Women, “*Facts and Figures: Leadership and Political Representation*,” Impact World Champion Leader,” diakses dari www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/factsand-Figures pada 19 April 2018 pukul 21.06

